

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan merupakan unsur pokok dalam pernikahan, apabila salah satu rukun dan syarat pernikahan tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah. Adapun rukun dan syarat pernikahan sebagai berikut:

1. Rukun

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Jumhur tokoh agama sepakat bahwa rukun sah dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.¹⁵

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.

d. Dua Orang Saksi

Dua orang saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Saksi juga sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

e. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu lafal yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁶

2. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Adapun syarat nikah sebagai berikut:

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan mahram dari calon istri
- 3) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 4) Jelas orangnya (bukan banci)
- 5) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 6) Tidak sedang mempunyai istri empat.

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.82

7) Tidak sedang ihram haj

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1) Beragama Islam.

Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S Al Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah Swt mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah Swt menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁷

2) Berdasarkan kemauan sendiri.

Tidak dibenarkan memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bukan pilihan dan disukainya. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dalam QS.An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا جِبَالَ لَكُمْ أَنْ تَرْبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاجِزَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 35

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata . Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁸

- 3) Tidak bersuami atau dalam pinangan orang lain
- 4) Tidak dalam masa iddah
- 5) Bukan mahram
- 6) Jelas orangnya
- 7) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁹ Apabila tidak

¹⁸ *Ibid.*, hlm.80.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Widyatama,2006), hlm.17.

dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Seseorang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: Pertama, wali nasab yaitu seseorang laki-laki menjadi wali karena masih berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Kedua, wali mu'tiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Ketiga, wali hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim.²⁰

d. Dua Orang Saksi

Syarat-syarat dua orang saksi laki-laki antara lain:

- 1) Beragama Islam.
- 2) laki-laki.
- 3) Sudah baligh (telah dewasa).
- 4) Berakal (tidak gila).
- 5) Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
- 6) Tidak fasiq.
- 7) Tidak pelupa.
- 8) Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- 9) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- 10) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- 11) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- 12) Memahami arti kalimat dalam ijab qabul.

²⁰ Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah, t.t.p., t.p., t.t., hlm.5

e. Ijab dan kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.²¹ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Definisi ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.
- 2) Ijab dan kabul harus menggunakan lafad secara jelas dan terang sehingga mudah dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh tokoh agama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.

²¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.82

B. Pernikahan dan Hukum adat

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²²

a. Secara etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fikih disebut نِكَاح dan زَوَاج, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti yaitu الضَّمُّ وَالْوَطْءُ.

1) Arti hakiki (yang sebenarnya) adalah الضَّمُّ (menindih, menghimpit, berkumpul).

2) Arti metaforik (majas, kiasan) ialah الوَطْءُ atau الْعَقْدُ, bersetubuh, akad atau perjanjian.²³

Sumber lain dijelaskan bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab تَزَوَّج yang merupakan masdar dari kata kerja نَكَح. Sinonimnya تَزَوَّج

²²Sohari Sahrani, *Tihani, Fikh Munakahat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 6

²³Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya : Cempaka, 2000), hlm. 27

kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan atau pernikahan.²⁴

b. Secara terminologi

Makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing tokoh agama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain: Tokoh agama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagaimana suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, maksudnya adalah seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan. Menurut Tokoh agama Syafi'iyah pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal atau dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *wath'i* artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangann. Sedangkan menurut Tokoh agama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Tokoh agama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal untuk mendapat kepuasan secara sah dimana seorang laki-laki memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.²⁵

²⁴ Beni Achmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 10

²⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10

Definisi nikah yang telah dikemukakan para fuqaha, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan. Nikah atau pernikahan dan selanjutnya disebut pekawinan pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pria dan wanita yang telah menjadi suami istri untuk dapat membentuk rumah tangga secara harmonis, dapat mengembangkan keturunan secara legal dan terhormat, hakikat nikah menurut Islam sebagaimana Allah Swt., menerangkannya dalam Qs.An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁶

Pendapat para mazhab diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian nikah menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm. 77

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah :
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸

Menikah akan meraih berbagai keutamaan yang luar biasa, menikah itu ibadah dengan sendirinya karena diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menikah dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An Nur: 32).²⁹

Ayat di atas menggunakan kata وَأَنْكِحُوا (nikahkanlah) yang merupakan

fi'il amr (kata perintah), yaitu seperti yang dikutip dari muslimah, Nabi

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm.76

²⁸ *Ibid.*, hlm.2

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm.354

shallallahu‘alaihi wa sallam juga memerintahkan kita untuk menikah, beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya (HR.Muslim).³⁰

Dalam hadits di atas juga digunakan *fi'il amr* فَلْيَتَزَوَّجْ (menikahlah). Dalam memilih pasangan yang terpenting ialah karena agamanya, seperti hadits:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسِبِهَا
وَجَمَالُهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya Di cerikan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.³¹

Hadis tersebut menyebutkan empat kriteria yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan saat memilih pasangan hidup, namun perlu diingat,

³⁰Zaki Al-Din 'Abd Al-Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Mizan Pustaka 2008), hlm.429

³¹Muhammad Nashiruddin Al Abani, Ringkasan shahih bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm.218

bahwa diantara harta, nasab, cantik, dan agama, harus perihal agamanya yang didahulukan. Tersurat dalam QS Al Huujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa.³²

Ayat tersebut mengingatkan kembali jika etika yang tak kalah penting dalam memilih pasangan hidup adalah yang paham agama dengan baik. Karena segala kebaikan di muka bumi ini harus disertai pemahaman (ilmu) yang baik pula. Abu Hurairah r.a mengabarkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تُكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi).³³

Asas perkawinan menurut UU No. 1/1974 adalah: (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 317

³³At-Tirmidzi, *as-Sunan, juz III, Kitab: an-Nikah*, no. hadits: 1084, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1403 H./1983 M.), him. 394

kepercayaan masing-masing; (3) Asas monogami; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian; (5) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.³⁴

2. Hukum Adat

Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku manusia dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara berupa norma atau kaidah baik tertulis atau tidak tertulis yang dapat menciptakan tata tertib dalam tatan masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasar keyakinan dan kekuasaan yang ada.³⁵ Merupakan suatu aturan tegas apabila dilanggar dikenai sanksi.³⁶ Hukum datang dari luar masyarakat itu sendiri dari penguasa, pemerintah atau berdasarkan agama. Sedangkan secara umum pengertian adat adalah ketentuan-ketentuan yang timbul serta berkembang dari masyarakat itu sendiri yang ditaati selaku hukum. Apabila kita akan menarik pengertian hukum adat dari uraian tersebut maka hukum adat adalah hukum yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat yang ditaati sebagai hukum. Istilah hukum adat bukanlah rangkaian istilah hukum dan istilah adat melainkan sebagai terjemahan dari buatan orang Belanda yang disebut “*adat recht*”. Seseorang yang mengemukakan istilah *adat recht* ini pertama kali yaitu Snouck Horgronje, beliau juga merumuskan

³⁴ UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

³⁵ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.51

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra aditya Bakti, 2014), hlm.1

hukum adat sebagai “*adat die recht gevolgen herbe*” artinya adat yang mempunyai sanksi hukum, jadi perkataan hukum mengandung pengertian bahwa apabila dilanggar akan timbul sanksi, sedangkan perkataan ‘adat’ merupakan kebiasaan.³⁷

Pembagian Hukum Adat di dalam penelitian yang pernah diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas (pada tahun 1977-1978), dinyatakan bahwa adat dibagi antara lain:³⁸

- a. Adat yang sebenar adat. Merupakan undang-undang alam, dimana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
- b. Adat istiadat. Suatu peraturan pedoman hidup masyarakat di seluruh daerah yang diperuntukkan selama ini, kemudia diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi terdahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
- c. Adat nan teradat. Adanya kebiasaan setempat dapat ditambah ataupun dikurangi menurut tempat dan waktu.³⁹
- d. Adat yang diadatkan. Merupakan adat yang dapat dipakai setempat.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam suatu

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Itizam, 2016), hlm.13

³⁸ Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012), hlm.61

³⁹ Ibid, hlm,62.

masyarakat. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, dalam keluarga serta adari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Perkawinan adat memiliki arti yang penting masyarakat dan disertai dengan upacara-upacara adat, agar kedua mempelai bahagia mengarungi hidup berkeluarga sampai akhir hayatnya. Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi didalamnya.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga besar dan kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya yang telah ada dan keadilannya dan untuk mempertahankan kewarisan. Dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Meskipun pernikahannya sudah sah menurut agama belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan, akan tetapi di Indonesia bahwa perkawinan menurut agama tetap menjadi tolok ukur yang utama. Hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter

masyarakat masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat.⁴⁰

Asas- asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:

3. Asas Keadatan dan kekerabatan⁴¹

Perkawinan dalam lingkup hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Perkawinan dalam hal ini juga sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat, kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan jujur dan persoalan-persoalan lainnya. Asas ini yang sebenarnya mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

4. Asas Kesukarelaan/Persetujuan

Hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan tujuan perkawinan.

5. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat.⁴²

Peran ikut serta orang tua beserta kerabat dan warga dalam masyarakat adat sangat memiliki arti yang begitu besar. Partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, berlanjut pada persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, baik secara langsung ataupun

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.52

⁴¹ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2019), hlm.111

⁴² Yulia, *Buku Ajar Hukum adat*, ..., hlm.53

tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

4. Asas Poligami

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi, poligami dalam hukum adat sudah teresepsi dalam hukum lainnya yang lebih kuat.

5. Asas Selektivitas

Proses dimana siapa yang berhak menentukan calon mempelai. Seperti pada uraian sebelumnya bahwa, dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam pemilihan calon mempelai.

Proses memilih calon mempelai mempunyai sedikit banyak peran yang ditentukan oleh orang tua beserta kerabat yang ada. Prosesi pemilihan calon mempelai yaitu diarahkannya pada jenis perkawinan mana yang dikehendaki dan menghindari mana perkawinan yang dilarang. Larangan pernikahan adat tidak ada ketentuan secara umum yang mengaturnya, karena setiap daerah meski pada satu wilayah yang sama memiliki suku adat yang berbeda-beda maka dalam menetapkan larangan pernikahan adat juga berbeda-beda.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm.54

C. Konsep urf dan adat

1. Konsep Urf

a. Pengertian Urf

Dilihat dari segi bahasa al urf berasal dari kata عَرَفَ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata مَعْرِفَةٌ (yang dikenal), تَعْرِيفٌ (definisi), kata مُعَرَّفٌ (yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata عَرَفَ bermakna kebiasaan yang baik. Terdapat dalam kamus ushul fiqh urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusi dan mereka patuhi, kebiasaan berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan. Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka. Sedangkan dalam bahasa arab urf memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan usul fiqh, urf adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya.

Secara terminologi, urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.⁴⁴ Sedangkan pengertian urf menurut terminologi ushul fiqh dapat kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini:

⁴⁴Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep urf dalam Penetapan Hukum Islam”, dalam *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2, November 2017, hlm.

1) Wahbah al-Zuhailly menyatakan bahwa urf adalah:

الْعُرْفُ : هُوَ مَا اخْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ , أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا
إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأْلُفُهُ اللَّغَةُ , وَلَا يَتَبَادَّرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ , وَهُوَ بِمَعْنَى , وَقَدْ شَمِلَ
هَذَا التَّعْرِيفُ الْعُرْفَ الْعَمَلِيَّ الْعَادَّةَ الْجَمَاعِيَّ وَالْعُرْفَ الْقَوْلِيَّ.

Artinya: “Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan ucapan”.⁴⁵

2) Muhammad Abu Zahrah

Al-urf merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan.⁴⁶

3) Abdul wahab Khallaf mengartikan urf adalah:⁴⁷

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ
الشَّرْعَيْنِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: “Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara urf dengan adat.”

⁴⁵Wahbah al-Zuhailly, *Ushul Fiqih Juz 2*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), hlm. 828

⁴⁶Nurul Afifah, “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro”, dalam *al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 36

⁴⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 89

Berdasarkan ketiga definisi diatas sebenarnya mengandung maksud yang sama bahwasannya istilah urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat, namun demikian tokoh agama yang lain ada yang membedakan antara urf dengan adat, sebagaimana uraian berikut:

Al-Jurjaniy dalam kitabnya *Al-Ta'rifat* memberikan definisi urf sebagai berikut:⁴⁸

مَا اشْتَقَرَّتْ فِيهِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّيْتُهُ الطَّبَائِعَ بِالْقَبُولِ

Artinya: “urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya”.

Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan urf dengan:⁴⁹

مَا اشْتَقَرَّتْ فِيهِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّيْتُهُ الطَّبَائِعَ بِالْقَبُولِ

Artinya: urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.

Berdasarkan dari kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa urf mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan

⁴⁸Syarif Ali ibn Muhammad alJurjaniy, *Kitab alTa'rifat*, (Beirut: Dar alKutub alIlmiyah, 1983), hlm. 149

⁴⁹Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *AlUrf wa alAdah fi Ra'y alFuqaha'*, (Kairo: Lembaga Penerbitan AlAzhar, 1947), hlm. 8

yang berlaku di masyarakat berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat manusia; dan yang ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

2. Macam-macam Urf

a. Dilihat dari segi sumber timbulnya

- 1) Urf Qauli, yang dimaksud dengan urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata "*lahm*" (bahasa Arab) yang artinya adalah daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging seperti daging ikan, sapi, kambing dan lain sebagainya, namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan, oleh karena itu jika ada orang bersumpah "Demi Allah saya tidak akan makan daging" tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan termasuk daging.
- 2) Urf Fi'li, adalah suatu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Misalnya seperti kebiasaan dalam jual beli pada barang-barang yang hanya kurang begitu bernilai, transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup pembeli menerima barang yang dibeli dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Berbeda halnya dengan kebiasaan mengambil rokok di antara sesama teman apa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak dianggap mencuri.

b. Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya sebagai berikut:

- 1) Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya: seperti menaggukkan kepala petanda setuju dan menggelengkan kepala meruoakan petanda menolak, apabila ada orang melakukan kebalikan dari itu maka orang itu dianggap aneh dan ganjil.
- 2) Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di suatu tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat lainnya. Misalnya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilinial) di daerah Minangkabau dan melaui bapak (patrilineal) terdapat di kalangan suku Batak. Orang sunda menggunakan kata paman hanya untuk adik dari ayah tidak digunakan untuk kakak dari ayah. Sedangkan orang Jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Bagi masyarakat tertentu penggunaan budak dianggap menghina. Karena kata itu berarti hamba sahaya. Tapi bagi masyarakat lainnya kata budak biasa digunakan untuk anak-anak.

c. Dilihat dari segi baik dan buruknya urf terbagi menjadi dua macam:

- 1) Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan

dengan norma agama, norma sopan santun dan budaya yang luhur yang berlaku. Contohnya mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi.

- 2) Urf Fasid, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara', dalam arti adat yang menghalalkan hal-hal yang sifatnya haram, dan yang mengharamkan hal-hal yang halal.⁵⁰

3. Syarat-syarat Urf

Urf yang dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum, serta menjadi suatu hukum adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga memenuhi kelayakan penggunaannya. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum. Terdapat empat syarat yang diberikan oleh ahli usul atas kelayakan suatu urf diantaranya:

- a. Tidak bertentangan teks-teks Al-Qur'an dan sunnah
- b. Urf berlaku umum, adalah diamalkan pada semua peristiwa atau suatu perkara yang sama tanpa ada yang berbeda, atau tersebar hampir di semua peristiwa.
- c. Urf harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya. Urf yang menjadi landasan hukum harus

⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), hlm. 210-211

lebih dahulu ada dan terus berlanjut hingga terjadinya peristiwa, tidak diadakan secara tiba-tiba atau baru ada setelah terjadi peristiwa tersebut.

- d. Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.⁵¹

4. KehujjahanUrf

Para tokoh agama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf diantaranya adalah yang paling mendasar :

- a. *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum)
- b. *لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ* (Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat)
- c. *الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْطًا* (Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat)

Para tokoh agama ushul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

5. Kedudukan urf dalam menetapkan hukum⁵²

⁵¹ Muhammad Tahmid Nur dan Anita Marwing, *Realitas urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Duta Media Publishing, 2020), hlm. 77

⁵² Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), hlm. 873

Urf shahih harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Seorang mujtahid harus memeliharanya pada saat waktu menetapkan hukum. Seorang hakim juga harus memakai adat ketika ia akan mengadili, maka Islam telah memelihara urf bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum. Contohnya disyaratkan adanya *kafaah* (kesesuaian) dalam perkawinan antara calon suami dan isteri, oleh karena itu para tokoh agama fiqh mengatakan bahwa adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Hukum yang didasarkan oleh urf itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman, dengan demikian para fuqaha berkata “perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti”. Oleh karena itu para tokoh agama mengamalkan urf dalam menetapkan hukum dengan syarat, yaitu adat atau urf itu mengandung mashlahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah kelaziman dalam urf shahih yang dapat diterima secara umum. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’.

Kata urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun, para tokoh agama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa urf dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama, oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum)

dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan,(karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِنَّمَا تُغَيِّرُ الْعَادَةَ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ إِطْرَبَتْ فَلَا

Artinya: Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.

2. Konsep Adat (Al adah Muhakkamah)

a. Pengertian

Berasal dari kata ‘adah yang berarti kebiasaan atau adat-istiadat. Adat secara bahasa arab “Aladatu“ (الْعَادَةُ) terambil dari kata “al audu” الْعَوْدُ dan “al muaawadatu“ (الْمَوَادَّةُ) yang berarti “pengulangan”, oleh karena itu, secara bahasa *al-’adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. adat didefinisikan:⁵³

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Istilah Al-Adat terbentuk dari mashdar Al-Aud dan Al-Mu’awadah bersal dari bahasa arab yang artinya adalah pengulangan kembali. Sedangkan pengertian Muhakkamah adalah bentuk Maf’ul dari Masdar

⁵³A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Fiqih (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.79

Tahkim yang berarti penyelesaian masalah, jadi al-'adah baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.⁵⁴

Setiap adat kebiasaan bukan berarti dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan syari'at.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
- 3) Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
- 5) Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.⁵⁵

b. Dasar-Dasar Kaidah Al'Aadah Muhakkamah diantaranya:

- 1) Dasar Al-Quran Surat Al-A'raaf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.⁵⁶

⁵⁴ Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 28

⁵⁵ Muchlis, Usman, Kaidah-Kaidah Istibath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 210

2) Dasar hukum didalam Hadits yaitu:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).⁵⁷

c. Perbedaan dan persamaan antar urf dan adat

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan urf dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana Urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf. Sedangkan adat didefinisikan sebagai suatu tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan secara individu maupun kolektif. Pengertian seperti ini, dapat ditarik suatu

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 176

⁵⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, cet. Ke-3, 2007), hlm. 292

kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan anatar istilah adat dan urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:⁵⁸

Perbedaannya adalah:

- 1) Bahwa ‘Adah itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan urf harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan urf apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- 2) ‘Adah bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan urf tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.
- 3) ‘Adah tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi ‘adah tersebut, sedangkan Urf selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi Urf.
- 4) Urf hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.⁵⁹

⁵⁸ Sucipto, “*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”, dalam ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, hlm. 28

⁵⁹ Muchlis, Usman, Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 208

- 5) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sedangkan adapun persamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah aktifitas yang diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

d. Adat dan Kepercayaan Terhadap Mitos

Adat merupakan bagian dari terbentuknya tradisi karena pengertian tradisi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi dalam kamus antropologi memiliki arti sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ada bersifat magis religius dari kehidupan penduduk asli yang mendiami suatu tempat, hal ini meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, kemudian menjadi peraturan yang mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁶⁰ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.⁶¹

⁶⁰ Ariyono dan Aminudin Siregar, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika pressindo, 1985, hlm.4

⁶¹ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.459

Membahas tentang kepercayaan berbeda dengan adat, definisi arti dari kepercayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah anggapan atau keyakinan individu bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Pengertian lainnya adalah sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari kelima agama yang resmi dianut. Kepercayaan bisa dianggap sebagai agama baik apabila telah diakui secara resmi oleh negara karena agama yang resmi terkait dengan keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai adalah nyata seperti Tuhan atau yang lainnya, selain kepercayaan mengakui terhadap Tuhan, terdapat juga kepercayaan terhadap dosa dan hukuman terhadap dosa tersebut. Kepercayaan ini membangun tradisi atau adat istiadat yang merupakan sebagai tali pengikat kuat dalam membangun tata tertib masyarakat, dimana pelanggaran terhadap tradisi tersebut dapat menimbulkan perasaan bersalah pada diri pribadi masyarakat penganutnya. Kepercayaan-kepercayaan tersebut merupakan hal yang mendasari perilaku masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia dalam kesehariannya.⁶²

Terdapat ciri umum kepercayaan masyarakat Asia Tenggara pra Islam atau sebelum agama Islam datang, yaitu adanya pemujaan terhadap roh-roh, melalui berbagai bentuk pesta dan pengorbanan,

⁶² Made Widiadnyana Wardiha, *Analisis Komparatif Peran Adat Dan Kepercayaan Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Berkaca Pada Adat Yang Ada Di Permukiman Tradisional*, dalam Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan, Vol.15.No.1 Oktober 2018, hlm.116

diyakini mampu menjamin agar roh-roh tersebut bersimpatik terhadap masalah pribadi apapun, seperti penyembuhan terhadap orang yang sedang mengalami sakit, pelayaran yang menguntungkan bagi mereka yang mengarungi lautan, panen yang baik, dan kehidupan suami istri yang bahagia. Secara umum kepercayaan masyarakat Asia Tenggara di Indonesia khususnya di tanah Jawa bertumpu pada paham tentang adanya roh-roh. Pada dasarnya roh-roh tersebut bersifat abstrak, namun diyakini bersemayam dalam benda-benda kongkret, baik benda mati maupun benda hidup. Demikian juga roh-roh tersebut diyakini berpengaruh kuat kepada segala bentuk kegiatan manusia, baik pada saat mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Keberadaan adanya roh-roh sebagai bagian dari kesatuan kosmos, roh penggerak tunggal. Para ahli modern menyebut konsep ini sebagai *anima* atau *animisme*.⁶³

Ahli modern seperti Nur Syam berpandangan bahwa pada dasarnya terdapat dua tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap nilai tradisi lama yaitu penerimaan dan penolakan. Penerimaan terhadap nilai dalam tradisi lama terwujud dalam tindakan partisipatif dalam berbagai upacara adat yang dilakukan diberbagai ruang budaya. Banyaknya keterlibatan masyarakat dalam suatu upacara adat cukup membuktikan bahwa masyarakat menerima terhadap pelestarian tradisi lama. Pada dasarnya terdapat dua tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap

⁶³ Ridhwan, *Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam*, dalam Jurnal Ekspose Vol.17, No.1, Januari-Juni, 2018, hlm.482

nilai tradisi lama yaitu penerimaan dan penolakan. Penerimaan terhadap nilai dalam tradisi lama terwujud dalam tindakan partisipatif dalam berbagai upacara adat yang dilakukan diberbagai ruang budaya. Banyaknya keterlibatan masyarakat dalam suatu upacara adat cukup membuktikan bahwa masyarakat menerima terhadap pelestarian tradisi lama.⁶⁴

Sedangkan mitos adalah suatu kepercayaan tradisional mengenai peristiwa gaib dan kehidupan dewa-dewa. Istilah mitos (mythos) berasal dari bahasa latin yang artinya adalah “perkataan” atau “cerita”. Orang pertama yang memperkenalkan istilah mitos adalah plato. Plato memakai istilah “*muthologia*”, yang artinya menceritakan cerita. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang asal usul semesta alam, manusia, bangsa itu sendiri. Sedangkan, dalam *Webster’s Dictionary*, mitos adalah perumpamaan atau alegori, yang keberadaannya hanya merupakan khayal biasa disebut takhayul yang tidak dapat dibuktikan wujud dan kebenarannya. Mitos termasuk dalam salah satu jenis cerita dongeng. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian mitos, berikut ini diantaranya:

- 1) William A. Haviland: mitos adalah cerita mengenai peristiwa-peristiwa semi historis yang menerangkan masalah-masalah akhir kehidupan manusia.

⁶⁴ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm 252

- 2) Cremers: mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati manusia.
- 3) Levi Strauss: mitos adalah suatu warisan cerita tertentu dari tradisi lisan yang mengisahkan dewa-dewi, manusia pertama, binatang, dan sebagainya berdasarkan suatu skema logis yang terkandung di dalam cerita itu yang memungkinkan kita mengintegrasikan semua masalah yang diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis.⁶⁵
- 4) Ahimsa putra: mitos adalah cerita yang “aneh” yang seringkali sulit dipahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari.⁶⁶
- 5) Endraswara membagi mitos menjadi empat jenis yaitu:
 - a) Mitos yang berupa *gugon tuhon* yaitu larangan-larangan tertentu yang jika dilanggar orang tersebut akan menerima dampak (akibat) yang tidak baik,
 - b) Mitos yang berupa bayangan asosiatif yaitu mitos yang berupa berhubungan dengan dunia mimpi. Orang Jawa masih percaya akan munculnya sebuah mimpi, jika mengalami mimpi buruk dipercaya sebagai tanda akan datangnya musibah yang akan

⁶⁵ Umar zein, dan Emir El Newi, Buku Ajar Ilmu Kesehatan (memahami Gejala, Tanda dan Mitos), Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, hlm.2

⁶⁶ *Ibid*, hlm.3

menimpa dirinya, sedangkan mimpi baik merupakan suatu petanda akan datang kesenangan, rejeki, dan kebahagiaan

- c) Mitos yang berupa *sirikan* (larangan) harus dihindari, mitos ini masih bersifat asosiatif tetapi penekanannya *ora ilok* (tidak baik) jika dilakukan, dalam artian jika seseorang melanggar hal-hal yang telah *disirik* (dilarang), maka dipercaya akan mendapat akibat yang tidak menyenangkan
- d) Mitos yang berupa dongeng, legenda, dan cerita. Hal ini biasanya diyakini karena memiliki legitimasi yang kuat dalam pikiran orang.⁶⁷

Fungsi mitos adalah untuk menerangkan. Mitos memberi gambaran dan penjelasan tentang alam semesta yang teratur, yang merupakan latar belakang perilaku manusia yang teratur, mitos juga memiliki fungsi seperti, merupakan proses penyadaran akan adanya kekuatan gaib disekitar yaitu berupa cara mengantisipasi, mempelajari, dan berelasi dengannya, fungsi mitos selanjutnya yaitu memberi garansi bagi kekinian maksudnya adanya peristiwa yang telah terjadi dan pernah ada dan diketahui masyarakat mitos mengandung saran serta antisipasi bagi kehidupan kekinian atau modern seperti saat ini, serta fungsi mitos memberikan penggambaran tentang dunia, tentang asal mulanya,

⁶⁷ Suwardi Endrawara, *Filsafat Hidup Jawa: Menggali Kebijakan Dari Intisari Filsafat Kejawen*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), hlm. 194

konteks untuk berbicara tentang awal dan akhir, atau asal-muasal dan tujuan kehidupan manusia.⁶⁸

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa urf adalah bukan sumber hukum yang berdiri sendiri dan harus ada sandaran atau pendukungnya baik dalam bentuk *ijma* maupun *mashlahat*. Adat yang sedang berlaku di kalangan umat berarti semestinya telah diterima secara baik oleh umat. Apabila semua para tokoh agama telah mengamalkannya maka berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma* meskipun dalam bentuk *sukuti*. Adat dapat diterima oleh masyarakat karena mengandung kemashlahatan, tidak memakai adat berarti tidak menerima kemashlahatan, sedangkan semua para tokoh agama telah sepakat megaharuskan untuk mengambil sesuatu yang bernilai mashlahat meskipun itu tidak ada nashnya.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan adanya kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain, maka dari itu diperlukannya suatu penjelasan mengenai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah :

- a. Peneliti Amalis Sofi'ah, Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Tumbuk Desa Di Desa Candirejo

⁶⁸ Fransiskus Simon, *Kebudayaan dan Waktu Senggang*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm.45

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar” Tahun 2014.⁶⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan nikah Tumbuk Desa yaitu Larangan nikah yang ditujukan kepada kedua calon mempelai yang mana nama belakang dari desa calon mempelai perempuan sama dengan nama belakang desa dari calon mempelai laki-laki atau sebaliknya. Adapun yang menyebabkan adanya larangan Nikah Tumbuk Desa adalah adanya akibat buruk yang terjadi pasca pernikahan Tumbuk Desa, seperti seperti mendapat omongan negatif dari masyarakat sekitar, kesulitan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perceraian, sakit-sakitan, bahkan sampai pada kematian. Setelah diteliti lebih mendalam menggunakan metode sadd adz-dzari’ah maka larangan nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar boleh diberlakukan, artinya adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adat yang ada bertujuan untuk mencegah ataupun menghindari timbulnya kemudharatan.

- b. Peneliti Leni Tri Wulandari, Penelitian yang berjudul “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)” Tahun 2017. ⁷⁰Penelitian ini

⁶⁹ Amalis Sofi’ah, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Tumbuk Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hlm.56

⁷⁰ Leni Tri Wulandari, Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo

menunjukkan pandangan bahwa masyarakat Dukuh Jaten Desa Mojo dan Masyarakat Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali masih mempercayai larangan perkawinan antar dukuh. Masyarakat memiliki kepercayaan apabila melanggar akan mendapat bencana bahkan kematian bagi yang menikah, keluarga serta masyarakat. Kemudian ketakutan masyarakat akan terputusnya tali silaturahmi. Apabila tetap melanggar haruslah mengadakan ritual selamatan dari salah satu pihak dan pengangkatan anak salah satu pengantin oleh salah satu Dukuh atau lain dukuh. Larangan ini dikarenakan oleh faktor kurangnya pendidikan Agama, faktor keyakinan, faktor keluarga serta faktor sosial masyarakat. Larangan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam hanya mengenal larangan perkawinan yang disebabkan karena adanya larangan perkawinan muabbad dan larangan perkawinan muaqqod. Secara qot'i juga disebutkan ketidak bolehanannya antara lain yaitu nikah mut'ah, nikah muhalil, nikah syigor dan nikah tahwid.

- c. Peneliti Rahmi Elfitri Harahap, Penelitian yang berjudul "Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Kober)." Tahun 2016.⁷¹
- Penelitian ini menunjukkan pandangan bahwa problem yang sedang

Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), hlm.56

⁷¹ Rahmi Elfitri Harahap, Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Kober), *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm.5

dihadapi oleh pasangan di Kelurahan Kober ini kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga dari pasangannya. Perbedaan pola pikir juga salah satu problem yang dihadapi, begitu juga dengan prinsip hidup yang berbeda-beda dari kelima anggota pasangan ini. Satu dari kelima pasangan tersebut tidak mengalami problem-problem seperti diatas, dikarenakan sikap saling mengerti dan saling memahami antara pasangan ini.

- d. Peneliti Subroto, Penelitian yang berjudul “Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo Dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo(Perspektif urf).” Tahun 2017.⁷² Penelitian ini menunjukkan pandangan bahwa larangan perkawinan antara warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo dengan Desa Golan Kecamatan Sukorejo adalah merupakan urf khashs dan juga urf fasid karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan masalah dari perkawinan. Sikap masyarakat yang mematuhi adat tidak dapat dibenarkan karena segala musibah atau bencana datangnya murni dari Allah SWT yang sudah menjadi ketetapan-Nya, bukan karena melanggar larangan adat.
- e. Peneliti Chrisna Wibowo, Penelitian yang berjudul “Analisis urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal

⁷² Subroto, Adat Larangan Pernikahan Warga Dusun Mirah Desa Nambang Rejo Dan Desa Golan Kecamatan Sukorejo(Perspektif urf), *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm.62

Ponorogo)” Tahun 2019.⁷³ Penelitian ini menunjukkan pandangan bahwa ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan Muharram masih dipandang sebagai suatu keyakinan yang harus di taati hal ini muncul dianggap sebagai masalah dimana terdapat pertentangan antara kebiasaan warga dengan hukum syara’, tepatnya di Desa Ketonggo Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo penulis menemukan suatu adat dan kebiasaan dimana masyarakat mentaati suatu aturan, dimana pada bulan muharram masyarakat tidak melakukan perkawinan untuk menghormati kebiasaan terdahulu dan sesepuh desa setempat. Urf Khas dan jugaurf Fasid yang bertentangan dengan syara’. Sedangkan faktor penyebab ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan muharram yakni karena masyarakat masih sangat menghormati kebiasaan sesepuh yang merupakan urf fi’li.

Bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini membahas tentang persepsi tokoh dan tokoh adat terhadap larangan pernikahan *gathuk* desa di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Pada penelitian ini tokoh agama yang diteliti terdiri dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Majelis Tafsir Al-Qur’an, dan Majelis Ulama Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk.

⁷³ Chrisna Wibowo, Analisis urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo), *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm.5